

# **PENERAPAN SISTEM POIN DALAM MENANGGULANGI SISWA YANG MELANGGAR ATURAN DI SMA N 2 PONTIANAK**

**Cahyo Fitriwati, Sulistyarini, Parijo**

Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP UNTAN, Pontianak

*Email: [cahyofitriwati@gmail.com](mailto:cahyofitriwati@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat tahapan yang mencakup pemberitahuan, teguran, peringatan dan hukuman dalam penerapan sistem poin di SMA N 2 Pontianak diaplikasikan kedalam berbagai bentuk. Pada tahap pemberitahuan dilakukan dengan sosialisasi saat MOS (Masa Orientasi Siswa), penyebaran surat edaran kebijakan sistem poin, adanya gambar dan penempelan tata tertib di setiap kelas. Pada tahap teguran dilakukan dengan teguran langsung dan teguran tak langsung. Pada tahap peringatan terdapat peringatan lisan dan tulisan. Pada tahap hukuman pihak sekolah melakukan skorsing, *home visit* dan pengembalian kepada orang tua. Adanya penerepan kebijakan ini memiliki dampak yang berbeda-beda pada tiap siswa yang melanggar aturan, akan tetapi berdasarkan observasi dan wawancara kepada informan (siswa) kebijakan ini memiliki efek jera untuk siswa tidak melakukan pelanggaran kembali.

**Kata Kunci : Sistem Poin, Pelanggaran Aturan.**

**Abstract :** The purpose of conducting this research is to determine the application of the points system to overcome the problem that students break the rules in SMA N 2 Pontianak. The research applies qualitative approach with descriptive methods and this research involves 9 informants. The results shows that four stages which include notification, reprimand, warning and punishment. Notification stage is applied in student orientation period. The school informed about the rules of the school. The school also provided pictures of rules in the school and every classroom. In reprimand stage, there are direct reprimand and indirect reprimand. In warning stage, there are verbal warning and written warning. In the punishment stage, the school conducts suspension and home visit. The school also returns the student to the parents if it is necessary. The applying of points system in SMA N 2 Pontianak has a different impact on each student who breaks the rules, but based on the observation and interview to informants (students) this system has a deterrent effect on students so that they will not break the rules again.

**Keywords: Points System, Breaking The Rules**

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang dan suatu bangsa demi kelangsungan masa depannya. Sekolah sangat berperan penting dalam mendampingi anak didiknya, Menurut Purwanto (2014: 80) menyebutkan sekolah dalam hubungannya dengan keluarga, “memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya”. Hal ini tercermin dalam pemberian tata tertib atau kedisiplinan di sekolah. Fungsi dan tujuan tata tertib yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak sekolah adalah untuk memperjelas apa yang boleh dan tidak boleh, sebagai batasan norma, tuntutan beretika dan bersikap sopan santun. Disiplin atau tata tertib yang diterapkan oleh sekolah harus dipatuhi oleh semua individu yang berada di lingkungan tersebut dan salah satunya peserta didik, karena disiplin merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sekolah.

Dalam melaksanakan disiplin sekolah tidak dituntut pada satu pihak saja, namun untuk melaksanakannya sedapat mungkin dilakukan oleh seluruh pihak yang ada di lingkungan sekolah. Kedisiplinan dapat dibentuk melalui ajaran atau atauran dalam sebuah lembaga pendidikan. Ajaran atau aturan tidak akan berlaku atau tidak akan dipatuhi dan membawa keadaan *chaos* atau kacau jika tidak ada hukuman bagi yang melanggarnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, salah satu permasalahan pendidikan yang sering kita dengar pemberitaan di media massa dan elektronik akhir-akhir ini, menggambarkan bahwa tingkat pelanggaran siswa terhadap aturan sekolah umumnya masih tergolong memprihatinkan.

Kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dari berbagai jenis pelanggaran tata tertib sekolah, misalnya banyaknya siswa yang bolos, terlambat datang ke sekolah, sering tidak masuk sekolah, malas belajar, tidak mengerjakan tugas sekolah, hingga yang mengarah kepada kekerasan yang dilakukan oleh siswa. Seorang anak tidak tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi nakal karena beberapa saat setelah dibentuk oleh lingkungan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak hanya itu seorang anak menjadi nakal bisa disebabkan oleh kelompok teman sebayanya. Menurut Henslin (dalam Damsar, 2011: 75) mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya memiliki “daya paksa terhadap orang yang masuk kedalamnya”. Hampir tidak mungkin orang melawan kelompok teman sebaya yang peraturan utamanya “konformitas atau penolakan”. Begitu pula dengan berperilaku seperti gaya berbusana, rambut, atau perilaku positif lainnya, bahkan juga perilaku negatif yang melanggar norma sosial.

Banyak hal yang menyebabkan perilaku tidak disiplin itu terjadi, baik dari ketidaktahuan peserta didik terhadap aturan, sanksi yang tidak jelas terhadap pelanggar aturan sekolah, contoh-contoh yang ditiru, maupun pengawasan terhadap tata tertib yang rendah. Hal ini tentu saja di perlukan suatu aturan yang dapat membuat siswa tidak lagi melakukan pelanggaran aturan di sekolah.

Begitu pula yang terjadi di SMA Negeri 2 Pontianak yang terletak di Jalan R.E Martadinata, menunjukkan adanya perilaku siswa yang melanggar aturan. Berdasarkan hasil pra riset pada tanggal 28 Oktober 2014 yang telah peneliti laksanakan dengan melakukan dialog langsung dengan 2 (dua) dari 3 (tiga) guru

BK yang bernama Pak Gst. Ari Tonang dan Ibu Ely diketahui terdapat beberapa pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa sejak bulan Agustus 2014. Adapun kasus-kasus pelanggaran yang tercatat oleh Guru BK yakni tidak mengikuti upacara bendera sebanyak 3 kasus, Alfa lebih dari 3 hari sebanyak 6 kasus, terlambat lebih dari 3 kali terdapat 6 kasus, bolos jam pelajaran 6 kasus, berpenampilan yang tidak sesuai dengan aturan terdapat 2 kasus dan bermasalah dengan guru 1 kasus.

Rendahnya kesadaran siswa untuk menaati tata tertib sekolah adalah masalah dan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan oleh semua pihak, oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk membatasi perilaku siswa yang melanggar aturan. Salah satu cara yang diterapkan adalah penggunaan sistem poin. Sistem poin merupakan kebijakan sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Siswa yang melanggar aturan akan diberikan sanksi yang berupa hukuman. Jenis hukuman ditentukan dari akumulasi jumlah poin yang didapat anak saat melakukan pelanggaran. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah. Masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda sesuai dengan tingkat besar dan kecilnya pelanggaran.

Selain itu menurut Yusransyah (2012) dalam penelitiannya menyebutkan “sistem poin pelanggaran merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin sekolah. Sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan peringatan yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa”.

Menurut Cowley (2011: 115) “disebagian besar sekolah menengah, penskorsan merupakan salah satu sanksi yang paling sering digunakan. Bergantung pada situasi sekolah hukuman skor dapat berjalan sangat baik, atau hukuman tersebut sama sekali tidak berguna. Dalam hal ini memerlukan pertimbangan profesional untuk memutuskan skor dengan hukuman (sanksi) yang bermanfaat”. Dalam melaksanakan sistem poin setiap sekolah memiliki mekanisme masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sistem poin adalah suatu kebijakan yang ada di SMA Negeri 2 Pontianak untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan poin atau skor sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar dan sering pelanggaran dilakukan, maka semakin berat juga hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah.

Ketika peneliti melakukan observasi awal, peneliti menemukan adanya sistem poin yang telah diterapkan di SMA Negeri 2 Pontianak. Kebijakan sistem poin ini sudah diterapkan selama kurang lebih 8 tahun yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan bersama pihak sekolah. Setiap siswa dan orangtuanya telah mengetahui sistem poin ini karena di sosialisasikan pada setiap awal masuk ajaran baru. Adapun *team work* sistem poin disajikan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Team Work Sistem Poin di SMA N 2 Pontianak**

No	Pelaksana	Tugas
1.	Kepala Sekolah	Penanggung jawab
2.	Waka kesiswaan	Pengawas
3.	Guru Piket	Pencatat poin dan pemberi sanksi ringan
4.	Wali kelas	Penasihat siswa
5.	Guru BK	Pemberi sanksi tingkat lanjut

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2015

Beberapa pemaparan yang dicantumkan diatas menjadi dasar pemikiran peneliti untuk meneliti “Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan di SMA Negeri 2 Pontianak”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan kebijakan sistem poin yang mencakup bentuk pemberitahuan, bentuk teguran, bentuk peringatan serta bentuk hukuman dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak.

Manfaat penelitian ini secara teoritik untuk memberikan sumbangan kajian dalam ilmu pendidikan dan ilmu sosiologi serta menambah bahan pustaka yang menyangkut tentang perilaku menyimpang yang dilakukan siswa. Secara praktis, bagi peneliti untuk mempraktikkan ilmu yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan. khususnya mata kuliah perilaku menyimpang. Selain itu melalui penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi sekolah untuk mempertegas penerapan sistem poin dalam menanggulangi perilaku siswa yang melanggar aturan. Dan bagi Universitas Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengkajian khususnya fakultas KIP.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Usman dan Abdi (2009:7) “penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya”. Selanjutnya menurut Nazir (2011:54) “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan dari pendapat kedua para ahli tersebut, maka yang menjadi alasan peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak sesuai dengan realita dan fakta yang ada.

Subjek dalam penelitian ini yaitu guru Piket, Wali Kelas, guru BK, dan siswa sebagai informan yang memiliki otoritas, memahami dan menguasai objek yang di teliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini

adalah Guru Piket, Wali Kelas, Guru BK, dan Siswa yang pernah melakukan pelanggaran aturan di SMA Negeri 2 Pontianak. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari arsip-arsip yang dimiliki oleh guru BK, yaitu tentang data dan arsip siswa yang melanggar aturan di SMA Negeri 2 Pontianak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam wawancara peneliti melakukan kontak langsung secara lisan dengan sumber data, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Guru Piket, Wali Kelas, Guru BK dan keenam orang siswa yang melanggar aturan. Dalam observasi, cara mengumpulkan data yang dilakukan adalah mengamati secara langsung obyek yang akan diteliti yaitu bagaimana penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak. Teknik dengan studi dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan mencari dan mempelajari data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti melalui catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak. Jadi dalam hal ini, peneliti mengamati pada penerapan kebijakan sistem poin yang mencakup bentuk pemberitahuan, bentuk teguran, bentuk peringatan dan bentuk hukuman dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak. Teknik analisis data penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengambilan keputusan, perpanjangan observasi dan triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

SMA N 2 Pontianak berlokasi di Jalan R. E Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Saat ini Bapak Drs. Suwandi M.Noor, M.Pd menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Pontianak. SMA Negeri 2 Pontianak ini berdiri diatas luas tanah seluas 12.004 m<sup>2</sup> dan juga luas bangunan seluas 3.044 m<sup>2</sup>. Diatas luasnya tanah tersebut terdapat beberapa fasilitas atau prasarana untuk menunjang berjalannya kegiatan di SMA N 2 Pontianak. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki SMA Negeri 2 Pontianak yaitu PMR (Palang Merah Remaja), Pramuka (Praja Muda Karana), Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera), Olahraga bola besar, Voli, Basket, Futsal, Ikarisda (ikatan Remaja Islam SMAN 2), Rokris (Kerohanian Kristen), Teater, *Marching Band*, *Modern Dance*, Tradisional *Dance*, dan Mading SMA N 2.

Sesuai dengan perkembangan saat ini, SMA Negeri 2 Pontianak menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum terbaru yaitu Kurikulum 2013 sebagai kurikulum acuan dalam meningkatkan pembelajaran melalui pendekatan saintifik pembelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Informan terdiri dari 1 orang Guru Piket, 1 orang Wali Kelas, 1 Orang guru BK, dan 6 orang siswa yang melanggar aturan. Adapun siswa yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu siswa

yang tercatat dalam arsip yang dimiliki guru BK. 6 orang siswa tersebut terdiri dari 2 orang siswa kelas X, 2 orang siswa kelas XI dan 2 orang siswa kelas XII.

**Tabel 2**  
**Data Identitas Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Haris, S.E	Guru piket
2	Dra. Sri Pamuji	Wali Kelas
3	Astono, S.Pd	Guru BK (Bimbingan Konseling)
4	Sultan Prima Fathullah	Siswa kelas X IIS 1
5	Trisna Mahendra	Siswa kelas X IIS 3
6	M. Habibie Ekiesyahputra	Siswa kelas XI MIA 3
7	Raja Akup	Siswa Kelas XI IIS 4
8	Chelssy Natali Dasra	Siswa Kelas XII IPA 1
9	Lesty Khairunisa Siregar	Siswa Kelas XII IPS 3

*Sumber: Data Olahan Peneliti 2015*

Tabel 2 menggambarkan data identitas informan dalam penelitian ini, diantaranya adalah Pak Haris selaku guru piket setiap hari senin yang bertugas untuk mengawasi siswa dari awal masuk dipagi hari, mencatat poin siswa yang terlambat dan yang memberikan izin jika ada siswa yang ingin keluar masuk pada saat jam belajar. Kedua Ibu Sri Pamuji selaku Wali Kelas yang memiliki tanggung jawab terhadap siswa-siswanya. Ketiga Pak Astono yaitu guru BK yang menangani siswa-siswa yang bermasalah jika wali kelas merasa tidak mampu lagi untuk mengatasi siswa yang bersangkutan. Kemudian 6 orang siswa yang jarang, kadang-kadang, dan sering melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak.

SMA N 2 Pontianak mempunyai kebijakan sistem poin dalam aturan atau tata tertib yang telah lama diterapkan. sistem poin merupakan suatu kebijakan sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan cara memberikan poin atau skor pada setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dapat dikatakan sistem poin merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial represif karena pelaksanaan sistem poin dilakukan setelah perilaku menyimpang atau pelanggaran terjadi.

Peneliti melakukan pengamatan secara mendalam tentang keadaan yang terjadi di lokasi penelitian secara langsung yang dituangkan dalam bentuk temuan-temuan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang bagaimana penerapan sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak. Observasi dilakukan selama 8 hari, hal ini dilakukan setelah melewati berbagai tahap pendekatan, persetujuan dan persiapan dalam pelaksanaannya, selain itu peneliti menyaring dan menyajikan supaya tidak melenceng dari fokus penelitian dan sasaran pokok karya ini yaitu tentang “bagaimana penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak”.

Adapun penerapan sistem poin ini dilihat dari 4 item penting yakni tahapan pemberitahuan, bentuk teguran, bentuk peringatan dan bentuk hukuman. Tahapan pertama adalah pemberitahuan, pada bentuk pemberitahuan dalam kebijakan sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak telah mengaplikasikannya kedalam

berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah sosialisasi saat MOS (Masa Orientasi Siswa) yang dilakukan pada saat awal ajaran baru, bentuk kedua ialah penyebaran surat edaran kepada orang tua siswa mengenai tata tertib di SMA N 2 Pontianak serta kebijakan sistem poin yang telah ditetapkan, bentuk ketiga yaitu penempelan tata tertib yang berisi aturan, bobot poin pelanggaran beserta konsekuensinya, dan yang terakhir ialah adanya gambar yang ada dilingkungan SMA Negeri 2 Pontianak merupakan salah satu bentuk pemberitahuan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang tata tertib yang ada.

Tahapan kedua ialah teguran, adanya teguran dalam kebijakan sistem poin yang diberikan kepada siswa dimaksudkan untuk memberitahu bahwa ada perilaku yang salah. Teguran bagi peserta didik terbagi menjadi dua macam yakni teguran langsung dan teguran tak langsung. Teguran langsung adalah teguran spontan yang diberikan saat terjadinya pelanggaran, sedangkan teguran tak langsung adalah teguran yang dilakukan setelah mendapat informasi dari pihak ketiga. Di SMA Negeri 2 Pontianak teguran langsung diberikan oleh guru kepada siswa dengan kata-kata yang singkat dan spontan ketika siswa melanggar aturan sedangkan teguran tak langsung dilakukan oleh guru jika pelanggaran aturan telah (sudah) terjadi. Dari hasil observasi ditemukan beberapa guru yang memberikan teguran langsung kepada siswa yang melanggar aturan misalnya terlambat datang ke sekolah, memakai sandal dan menggunakan sepatu yang berlis merah. Teguran tak langsung dilakukan oleh guru piket yang melihat catatan dibuku besar siswa yang bersangkutan terlambat sudah lebih dari 5 kali.

Tahapan ketiga dalam kebijakan ini adalah peringatan, bentuk peringatan merupakan tahap lanjutan kepada siswa yang masih terus melanggar aturan. Setelah teguran diberikan kepada siswa, namun siswa tidak menggubrisnya atau masih melanggar aturan, maka dalam hal ini wajib memberikan peringatan kepadanya. Dalam penerapan sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak bentuk peringatan dilakukan dengan dua cara yaitu peringatan lisan dan peringatan tulisan. Peringatan lisan yakni berupa pembinaan yang dilakukan oleh guru BK. Sedangkan Peringatan tulisan ialah peringatan yang diberikan dengan pemberlakuan Surat Peringatan (SP), pemberlakuan SP disertai dengan pemanggilan orang tua siswa. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan adanya pemberian peringatan lisan kemudian diikuti dengan peringatan tulisan untuk siswa yang bernama M.Tirta Sugianto karena kasus pelanggaran sering tidak masuk sekolah (alfa) dan beberapa kali keluar jam pelajaran.

Tahapan keempat yakni hukuman, setiap sekolah memiliki suatu cara atau kebijakan dalam menetapkan aturan atau tata tertib beserta hukuman yang harus diterima oleh siswa, di SMA Negeri 2 Pontianak tidak memberlakukan hukuman fisik. Adapun hukuman dalam kebijakan sistem poin yang berlaku di SMA Negeri 2 Pontianak yakni: (a) Skorsing, Skorsing merupakan suatu bentuk hukuman dengan cara melarang anak masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu serta poin sudah mencapai angka 75; (b) *Home Visit* ialah kunjungan kerumah siswa oleh guru BK untuk mengetahui latarbelakang keluarganya dan bagaimana siswa tersebut dirumah. Hukuman ini diberlakukan jika siswa sudah mencapai poin 90; (c) Hukuman ini berlaku jika poin siswa sudah mencapai angka 100, hal ini

dilakukan dikarenakan pihak sekolah sudah tidak mampu untuk membimbing siswa yang bersangkutan.

### **Pembahasan**

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 9 Februari hingga 12 Maret 2015 di SMA N 2 Pontianak. Peneliti melakukan observasi, wawancara sampai dokumentasi mengenai penerapan sistem poin dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan di SMA N 2 Pontianak. Semua tahapan dalam kebijakan ini diaplikasikan kedalam berbagai bentuk. Saat observasi terdapat beberapa aspek yang tidak peneliti temukan dikarenakan aspek tersebut waktu kegiatannya telah berlalu.

Secara keseluruhan menurut hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, bentuk pemberitahuan dalam kebijakan sistem poin di SMA N 2 Pontianak diaplikasikan kedalam bentuk sebagai berikut: (a) Sosialisasi Saat MOS (Masa Orientasi Siswa), kebijakan sistem poin selalu di sosialisasikan kepada siswa saat awal ajaran baru yaitu ketika MOS. Pada kegiatan ini beberapa orang yang berwenang mensosialisasikan seperti Kepsek, Guru BK dan Wali kelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dan pengenalan tentang peraturan yang berlaku, poin-poin pelanggaran, beserta sanksi yang akan diterima; (b) Surat Edaran, tidak hanya siswa yang harus mengetahui tentang kebijakan sistem poin ini akan tetapi sekolah juga melakukan penyuluhan kepada orang tua siswa dengan tujuan agar orang tua juga mengetahui bagaimana kebijakan yang sekolah terapkan beserta konsekuensinya. Surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa harus dikembalikan dengan menyertakan tanda tangan bahwa menyetujui kebijakan tersebut, pihak sekolah juga berharap agar orang tua turut bekerjasama untuk menjalankan kebijakan sistem poin ini dengan selalu mengingatkan, menasehati, dan mendukung anaknya agar selalu patuh dengan aturan yang ada; (c) Penempelan Tata tertib, Agar sekolah aman dan tentram maka tata tertib juga ditempel dikelas dengan tujuan untuk mengingatkan siswa tentang aturan yang berlaku disekolahnya; (d) Gambar, Adanya gambar yang ada dilingkungan SMA Negeri 2 Pontianak merupakan salah satu bentuk pemberitahuan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang tata tertib yang ada. Gambar tentang tata tertib tentunya memiliki makna atau arti yang harus dipahami oleh siswa.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa tahapan pemberitahuan dalam sistem poin yang berlaku di SMA Negeri 2 Pontianak telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Irfani (2012: 55) yang menyebutkan bahwa “umumnya dilakukan dengan cara melalui pengarahan, penyuluhan, ajakan, gambar dan tulisan”. Hal ini ditandai dengan adanya pengarahan dalam bentuk sosialisasi setiap awal ajaran baru, adanya penyuluhan dalam bentuk penyebaran surat edaran kepada orang tua siswa mengenai tata tertib dan sistem poin, adanya gambar yang berkaitan dengan tata tertib disekitar lingkungan sekolah dan adanya penempelan tata tertib yang berupa tulisan di setiap kelas.

Pada bentuk teguran berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA Negeri 2 Pontianak semua guru memiliki kewajiban untuk menegur siswanya tanpa ada pengecualian. Baik siswa melakukan pelanggaran aturan yang ringan maupun pelanggaran aturan yang berat. Dalam kebijakan sistem poin pada bentuk

teguran dapat dilakukan dengan teguran langsung dan teguran tak langsung. Peneliti menemukan adanya teguran langsung yang diberikan dan ditujukan kepada siswa dengan spontan ketika siswa sedang melanggar aturan. Seperti terdapat siswa yang pakaiannya tidak rapi, dengan spontan guru yang melihatnya mengatakan “masukkan bajunya!”. Teguran tak langsung peneliti temukan yaitu adanya pelaporan pelanggaran aturan ketika pelanggaran sudah terjadi. Misalnya salah seorang guru melaporkan bahwa seorang siswa saat pelajarannya tertidur dikelas.

Bedasarkan paparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk teguran dalam sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak sudah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Yanuar (2012: 63) “teguran bagi peserta didik terbagi menjadi dua macam yakni teguran langsung dan teguran tak langsung. Teguran langsung adalah teguran spontan yang diberikan saat terjadinya pelanggaran, sedangkan teguran tak langsung adalah teguran yang dilakukan setelah mendapat informasi dari pihak ketiga”.

Dalam penerapan sistem poin adapun bentuk peringatan yaitu peringatan lisan dan peringatan tulisan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 2 Pontianak bentuk peringatan lisan yakni berupa pembinaan yang dilakukan oleh guru BK maupun Wali Kelas. Sedangkan peringatan tulisan dilakukan dengan cara pemberlakuan Surat Peringatan (SP), di SMA Negeri 2 Pontianak pemberlakuan SP disertai dengan pemanggilan orang tua siswa. Siswa yang melanggar aturan jika masih melakukan tindakan tersebut tentunya akan mendapatkan peringatan lisan barulah kemudian peringatan tulisan, hal ini dilakukan agar siswa menyadari akan tindakan pelanggaran aturan tersebut dan diharapkan adanya efek jera.

Tahap peringatan dalam sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lestari (2011) yang menyatakan bahwa “bentuk peringatan yang diberikan kepada siswa ada dua macam yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis”. Hal ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara kepada guru dan siswa yang mana dapat diketahui dalam pemberian peringatan lisan berupa pembinaan dan peringatan tulisan berupa Surat Peringatan (SP).

Setelah melewati tahapan pemberitahuan, teguran, dan peringatan, seorang guru yang mendapati anak tetap melakukan suatu kesalahan, maka memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman kepada anak tersebut. Bentuk hukuman dalam sistem poin berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 2 Pontianak tidak memberlakukan hukuman fisik. Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Yanuar (2012: 18) “hukuman dalam dunia pendidikan bukanlah suatu bentuk siksaan, melainkan suatu usaha untuk mengembalikan anak kearah yang lebih baik serta memotivasi mereka agar menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif”. Pihak sekolah tidak menggunakan hukuman fisik pada siswa yang melanggar aturan.

Hukuman dalam sistem poin yang berlaku di SMA Negeri 2 Pontianak adalah sebagai berikut: (a) Skorsing, merupakan suatu bentuk hukuman dengan cara melarang anak masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu serta poin sudah mencapai angka 75; (b) Hukuman skorsing dimaksudkan agar adanya rasa

bersalah dan rasa malu yang didapat oleh siswa jika terlampaui banyak melanggar aturan; (c) *Home Visit*, ialah kunjungan kerumah siswa oleh guru BK untuk mengetahui latarbelakang keluarganya dan bagaimana siswa tersebut dirumah. Hukuman ini diberlakukan jika siswa sudah mencapai poin 90. Tujuan dilakukannya *Home Visit* adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang orang tuanya apakah harmonis hubungan keluarganya karena sangat berpengaruh pada kelakuan anak saat di sekolah, bagaimana perhatian yang diberikan, bagaimana cara orang tua mendidik si anak, pada jam berapa anak ada dirumah, bagaimana kelakuannya di rumah apakah sama dengan kelakuannya di sekolah; (d) Pengembalian Kepada Orangtua Siswa, Hukuman ini berlaku jika poin siswa sudah mencapai angka 100, hal ini dilakukan dikarenakan pihak sekolah sudah tidak mampu untuk membimbing siswa yang bersangkutan.

Bedasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk hukuman dalam sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak sesuai dengan teori yang diungkapkan Yanuar (2012: 18) “hukuman dalam dunia pendidikan bukanlah suatu bentuk siksaan, melainkan suatu usaha untuk mengembalikan anak kearah yang lebih baik serta memotivasi mereka agar menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif”. Hal ini terlihat dari bentuk hukuman yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Pontianak tidak menggunakan hukuman fisik, hukuman yang digunakan adalah hukuman yang mendidik dan mengakibatkan efek jera kepada siswa yang melanggar aturan.

Dalam menanggulangi siswa yang melanggar aturan sesuai dengan tahapan dalam kebijakan sistem poin, kemudian hasil atau dampak terhadap siswa terlihat bahwa kebijakan tersebut memiliki efek jera jika siswa ingin melakukan pelanggaran aturan kembali. Dari hasil observasi kepada siswa selama 6 kali terlihat bahwa siswa-siswa tersebut mengalami perubahan perilaku yang berbeda-beda jika melanggar aturan disekolah. Perbedaan perubahan perilaku tersebut dilihat sejauh mana siswa memasuki tahap dalam penerapan sistem poin, dari tahap sederhana yaitu pemberian teguran sampai kepada tahap hukuman yakni dilakukannya *home visit* kepada siswa yang bersangkutan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan secara umum yaitu pelaksanaan sistem poin yang ditetapkan oleh sekolah yakni melalui 4 (empat) tahapan. Adapun tahapan tersebut yaitu tahap pemberitahuan, teguran, peringatan dan hukuman. Pada tahapan pemberitahuan dengan dilakukannya pengarahan saat MOS (Masa Orientasi Siswa), penyebaran surat edaran, penempelan tata tertib dikelas, adanya gambar-gambar mengenai tata tertib di lingkungan SMA N 2 Pontianak. Pada tahapan teguran dilakukan dengan cara teguran langsung dan teguran tak langsung kepada siswa yang melanggar aturan. Pada tahap peringatan terdapat peringatan lisan dengan dilakukannya pembinaan dan peringatan tulisan dengan pemberlakuan SP (Surat Peringatan). Dan pada tahap hukuman dilakukan dengan cara memberikan skorsing, *Home Visit* serta pengembalian kepada orang tua siswa. Adapun dampak dengan

diterapkannya kebijakan sistem poin ini berbeda-beda pada tiap siswa. Dari hasil penelitian terdapat beberapa siswa yang jera dan beberapa takut akan beban poin yang ia miliki.

### **Saran**

Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Kepada pihak SMA N 2 Pontianak diharapkan selalu melakukan sosialisasi secara terus menerus menyangkut kebijakan sistem poin, (2) Kepada SMA Negeri 2 Pontianak, peneliti menyarankan agar penerapan sistem poin lebih diperjelas lagi prosedur dalam pelaksanaannya, (3) Kepada siswa yang melakukan pelanggaran aturan di SMA Negeri 2 Pontianak, peneliti menyarankan agar menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, hal ini dimaksudkan agar tercipta kedisiplinan sehingga tidak terdengar lagi siswa yang dipanggil orang tuanya, *diskorsing*, *home visit* dan siswa yang dikeluarkan, (4) Kepada Orang Tua siswa dan masyarakat yang berada dilingkungan sekitar SMA N 2 Pontianak peneliti menyarankan agar dapat mendukung kebijakan sistem poin ini dengan bekerjasama dengan pihak sekolah, (5) Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar peneliti lain melakukan penelitian dengan aspek yang berbeda.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Damsar. (2011). **Pengantar Sosiologi Pendidikan**. Jakarta: Kencana.
- Irfani, Amalia. (2012). **Pengantar Sosiologi**. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Lestari, Danar Dwi A. (2011). **Efektivitas Pemberian Peringatan Untuk Membentuk Karakter Disiplin Siswa Di SMK PGRI 3 Malang**. (Online). (<http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel1808B057A5F000E39D296D89E35EE40D8.pdf>, dikunjungi 28 Januari 2015).
- Nanang. (2014). **Pengantar Pendidikan**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Mohammad. (2011). **Metode Penelitian**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, Nanang. (2014). **Pengantar Pendidikan**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, Rianse & Abdi. 2009. **Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi**. Bandung: Alfabeta.
- Yanuar A. (2012). **Jenis-jenis Hukuman Edukatif untuk Anak SD**. Jogjakarta: DIVA Press.
- Yusransyah, Muhammad. (2012). **Menegakkan Disiplin Siswa Melalui Sistem Poin Pelanggaran (Kartu Kuning)**. (Online). (<http://blogpendidikanbahasa.blogspot.com/2012/08/menegakkan-disiplin-siswa-melalui.html#.VLZc9GdNSZQ>, dikunjungi 6 Januari 2015).